BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran *platform* Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada perencanaan Jangka Panjang Daerah Bupati yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah sekaligus mencerminkan kinerja Bupati beserta jajaran Perangkat Daerah Kabupaten selama kurun waktu masa jabatan Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Daerah dan selaku Wakil Pemerintah di Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu .

RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari Visi, Misi, dan program dari Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunan RPJM Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, yang di dalamnya memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana – rencana Kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam RPJM Daerah juga ditekankan arti pentingny upaya dalam menerjemahkan visi, misi dan agenda kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran strategi dan kebijakan pembangunan yang mampu merespon kebutuhan dan asnpirasi masyarakat serta kesepaktan tentang

tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan maupun ketidak berhasilan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam penyusunan dokumen RPJMD daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 - 2016 diharapkan dapat di jadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program – program pembangunan daerah selama kurun 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggung jawab atas pelaksanaan hasil – hasil pembangunan kepada masyarakat pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan.

Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah di Daerahnya, dimana dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan oleh BAPPEDA, sesuai amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Kepala BAPPEDA Provinsi Kabupaten Sambas bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan sebagaimana sistem perencanaan pembangunan di atas.

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, BAPPEDA sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari jajaran Pemerintahan Daerah yang menjalankan otonomi daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dengan demikian, Kepala BAPPEDA berkewajiban menyusun RENSTRA berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Suatu kegiatan selalu diawali dengan perencanaan karena perencanaan merupakan sebuah konsep yang dibuat untuk menggerakkan suatu kegiatan yang akan dilakukan, sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan teratur dan terarah. Salah satu sumber pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan secara lebih proporsional, tentunya pemerintah Kabupaten Sambas membutuhkan APBD yang kuat, baik besaran maupun strukturnya. Namun mengingat proporsi transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Sambas sangat dominan, maka upaya memperkuat APBD harus dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan asli daerah, baik melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah maupun dengan mencari sumber-sumber penerimaa baru sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Keadaan ini mendorong munculnya pemikiran baru dalam pembangunan yang akan lebih banyak melibatkan peran serta masyarakat dala proses pembangunan dan mengurangi peranan pemerintah yang terlalu dominan selama ini. Dengan pemikiran baru ini diharafkan semua kepentigan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, budaya, politik dan ekonomi sangat beragam dapat diakomodasikan dengan fokus untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sambas yang mandiri, berprestasi, madani dan sejahtera.

Dengan kondisi permasalahan diatas, maka tugas pemerintah Kabupaten Sambas dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat akan mnjadi semakin kompleks terutama untuk menggerakan ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas SDM melalui Pendidikan dan kesehatan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih religius.

Berdasarkan latar belakang Laporan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan laporan dengan judul sebagai berikut: **“ REVIEW PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2012 – 2016”.**

1.2. Lokasi dan Waktu KKL

A. Lokasi

Lokasi yang diambil sebagai tempat Laporan KKL adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang beralamatkan di Jln. Pembangunan Sambas Kabupaten Sambas Prov. Kalimantan Barat Telepon (0562) 392824. Adapun jadwal kegiatan KKL.

B. Waktu

Waktu penulisan laporan kuliah kerja lapangan yang terdiri atas :

1. Mengajukan surat ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas tahun 2012
2. Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan bulan Juli – Agustus tahun 2012
3. Pengumpulan data bulan Juli – Agustus tahun 2012
4. Penulisan laporan bulan oktobrt – Desember tahun 2013
5. Pengumpulan laporan bulan Desember tahun 2013

Tabel 1.1
Kegiatan KKL

No	Kegiatan	2012			2013		
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	**Tahap Persiapan**						
	Observasi KKL						
	Pengajuan Judul						
	Penyusunan Bab I						
2	**Tahap Pelaksanaan**						
	Pelaksanaan KKL						
3	**Tahap Akhir**						
	Penyusunaan Laporan KKL						